

**MEMBANGUN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI BALI
(KAJIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN
DALAM LOCAL COMMUNITY DI BALI)**

I Nyoman Subanda

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*Korespondensi: nyomansubanda@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan dan menganalisis implementasi pemberdayaan masyarakat di Bali, khususnya pemberdayaan perempuan dari keluarga miskin; dan (2) membangun sebuah model pemberdayaan perempuan dalam komunitas lokal di Bali. Deskripsi dimulai dari peran perempuan di Bali, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Bali. Berdasarkan temuan tersebut dibangun sebuah model pemberdayaan perempuan miskin di Bali. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan peran perempuan Bali sangat strategis dalam komunitas lokal Bali. Peran mereka tidak saja pada peran domestik dan ekonomi tetapi juga dalam peran adat. Dalam lembaga keluarga, perempuan (ibu) menjadi teladan dan sangat mempengaruhi tata nilai yang dianut keluarga. Tetapi kondisi ini berbenturan dengan sistem purusa (patrimonial) dalam kehidupan adat di Bali yang meletakkan pengambil keputusan pada kaum laki-laki, sedangkan perempuan berada di sekitar pengambilan keputusan. Berdasarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Bali, maka program-program yang ada belum cukup untuk mendorong meluasnya penanaman nilai-nilai kemanusiaan (kejujuran, kepedulian dan kerelawanan) yang disepakati sebagai akar masalah kemiskinan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga belum cukup signifikan melaksanakan pemberdayaan perempuan. Pelibatan perempuan masih bersifat syarat normatif dan terkesan masih diletakkan sebagai objek bukan subjek program. Untuk itu dibangun model pemberdayaan perempuan melalui pendekatan kelompok usaha produktif yang mendorong para perempuan mampu mengembangkan kapasitas mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Model ini meletakkan perempuan sebagai subjek dan objek program dengan membangun sinergitas antar aktor pemberdayaan dan pengambil keputusan dalam masyarakat lokal di Bali.

Kata Kunci : Pemberdayaan; Perempuan miskin; Local Community

ABSTRACT

This research aims to (1) describe and analyze the implementation of community empowerment in Bali, especially the empowerment of women from poor families; and (2) build a model of women's empowerment in local communes in Bali. The description starts from the role of women in Bali, the implementation of community empowerment in Bali. Based on these findings, a model of empowering poor women in Bali was built. Based on the research results, it can be described that the role of Balinese women is very strategic in the local Balinese community. Their role is not only in domestic and economic roles but also in traditional roles. In the family institution, women (mothers) become role models and greatly influence the value system adopted by the family. But this condition

clashes with the purusa (patrimonial) system in Balinese traditional life that puts the decision-makers in men, while women are in the vicinity of decision-making. Based on the implementation of community empowerment in Bali, the existing programs are not enough to encourage the widespread cultivation of human values (honesty, care and volunteerism) which are agreed to be the root causes of poverty. The implementation of community empowerment is also not significant enough to empower women. The involvement of women is still a normative requirement and seems to be placed as the object rather than the subject of the program. For this reason, a women's empowerment model was developed through a productive business group approach that encourages women to develop their capacity, including in decision-making through a continuous learning process. This model places women as the subject and object of the program by building synergy between empowerment actors and decision makers in local communities in Bali.

Keywords : *Empowerment; Poor women; Local Community*

A. PENDAHULUAN

Paradigma administrasi publik masakini menekankan pentingnya upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. King dan Stivers bahkan menegaskan tentang pentingnya para administrator public untuk focus pada tanggung jawab untuk melayani dan memberdayakan (serve and empower) warganegara, ketika mereka mengelola organisasi-organisasi public dan mengimplementasikan kebijakan publik (Denhardt and Denhardt, 2003:23).

Berkenaan dengan pemberdayaan, dalam komunitas di Indonesia, khususnya di Bali, peran perempuan sering kurang mendapat tempat dan bahkan terpinggirkan. Terkadang perempuan difungsikan hanya untuk memenuhi syarat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Padahal dalam kehidupan sosial, peran perempuan Bali sangat strategis melalui tiga perannya yaitu peran domestik, peran ekonomi dan peran adat (sosial). Tiga peran ini sangat berbeda dan menempatkan peran perempuan Bali sangat penting dalam kehidupan komunitas lokal Bali (desapakraman). Melihat kondisi tersebut, dapat diasumsikan bahwa dalam

membangun keterlibatan masyarakat melalui pemberdayaan, adalah penting mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan pada perempuan diharapkan memberikan daya ungkit bagi percepatan peningkatan kapabilitas masyarakat khususnya dalam mencapai kondisi civil society.

Mengingat peran perempuan Bali memiliki spesifikasi khas dibandingkan peran perempuan di daerah lain, maka dalam pemberdayaan masyarakat di Bali dibutuhkan model pemberdayaan perempuan yang spesifik. Untuk maksud tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan model pemberdayaan perempuan miskin yang tepat dan sesuai dengan lokalitas kondisi di Bali.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilaksanakan akan menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Strauss and Corbin (Golafshani, 2003) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah "any kind of research that produces findings not arrived at by means of statistical procedures or other means of

quantification. "Penelitian yang akan dilaksanakan akan berlokasi Provinsi Bali khususnya di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar. Lokasi dipilih dengan alasan Kota Denpasar mewakili karakteristik kota yang penduduknya mulai heterogen dan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi sedangkan Kabupaten Klungkung dipandang masih memiliki karakteristik perdesaan. Informan penelitian diambil dari unsur Pemerintah Daerah, unsur desa adat, pelaku pemberdayaan dan masyarakat miskin dan perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, studi dokumentasi dan FGD.

Dalam rangka keperluan penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti mengikuti beberapa cara yang sering digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yaitu melalui keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, kecukupan referensi dan uraian yang rinci. Analisis-*analisis* kualitatif cenderung menggunakan logika induktif, di manasilogis medibangun berdasarkan padahal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum (Bungin, 2008: 143). Teknik analisis data yang dipergunakan berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan dengan mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang mendasari penelitian ini untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

tuntas sehingga data sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu : reduksi data (data reduction), penyajian data (display), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (concluding drawing/verivication). Keluaran penelitian ini di harapkan berupa : (1) Laporan penelitian tentang model pemberdayaan perempuan di Bali yang juga disertai format laporan dalam bentuk jurnal yang akan diusulkan dalam jurnal-jurnal ilmu sosial terakreditasi nasional. (2) Adanya model pemberdayaan perempuan miskin di Bali yang aplikatif, dan mampu menjawab permasalahan penanggulangan kemiskinan di Bali yang sesuai dengan kearifan lokal dalam kehidupan local community di Bali.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN **Model Pemberdayaan Perempuan** **Bali Berbasis Desa Adat**

Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Akhir-Kahir Ini Menjadi Penting Untuk Dikemukakan. Hal Ini Wajar Mengingat Jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Di Bali, menurut data BPS tahun 2013, jumlah penduduk Bali pada Tahun 2012 adalah mencapai 3.686.665 jiwa yang terdiri dari 1.836.592 jiwa penduduk perempuan dan 1.850.073 jiwa penduduk laki-laki.

Mendorong peranan perempuan juga penting jika dilihat dari isu gender yang mendorong kesetaraan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Hal ini krusial karena kesenjangan peran laki-laki dan perempuan dinilai masih tinggi. Bahkan UNDP pada tahun 1995, sebagaimana dikutip Birgitta Sevefjord dalam Sida Studies No. 3 menyatakan bahwa "there is no country in the world where gender equality has been achieved."

Oleh karenanya, berbagai diskusi menyepakati bahwa peranan perempuan perlu didorong untuk memaksimalkan keterlibatannya dalam pembangunan.

Ditinjau dari sudut pandang agama Hindu, sesungguhnya perempuan memiliki kedudukan yang utama dan sejajar dengan laki-laki. (Manawa Dharmasastra Bab III sloka 58 dan 59; Bab IX, 96, sloka 3). Tetapi dalam kehidupan adat di Bali kesejajaran tersebut terdistorsi oleh sistem purusa dalam hukum waris di Bali yang melahirkan kultur patriarki yang berhasil mengonstruksi citra, peran, kedudukan dan fungsi perempuan menjadi mitos sebagai warga negara dan warga masyarakat kelas dua yang yang tidak terbantahkan (Lengermann dan Niebrugge-Brantley, dalam Tirka Widanti Ni Putu, 2011).

Meski terdistorsi oleh penerapan sistem purusa, peran perempuan Bali sangat strategis melalui tiga perannya yaitu peran domestik (pengurus rumah tangga), ekonomi (pencari nafkah keluarga dan adat (peran menyiapkan dan melaksanakan upacara adat). Perempuan Bali oleh karenanya sangat dominan menjadi role models yang mempengaruhi tata nilai dalam keluarga, meski dalam pengambilan keputusan tidak terlibat langsung. Penerapan sistem purusa menyebabkan perempuan Bali menjadi ter subordinasi sehingga sulit terlibat langsung dalam penanganan masalah publik. Hal ini terlihat dari lemahnya peran perempuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Bali.

Peran perempuan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan hanya menjadi syarat administratif, bukan hal yang menjadi mainstream pelaksanaan pemberdayaan. Pembangunan kapasitas perempuan tidak

dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Penetapan keterlibatan perempuan minimal 30% dalam setiap kegiatan tidak maksimal mendorong peran perempuan dalam penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri ternyata juga kurang optimal dalam mendorong menyebarnya penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang menjadi sasaran pokok program sebagai solusi atas akar masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari pelaku-pelaku yang terlibat aktif jumlahnya tidak semakin banyak bahkan cenderung menurun sebagaimana terlihat dari berbagai kehadiran pelaku dalam rapat-rapat pelaksanaan program.

Untuk menjawab kelemahan tersebut maka dibangun model pemberdayaan perempuan yang meletakkan perempuan sebagai sentral pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua alasan penting menjadikan perempuan sebagai sentral pemberdayaan masyarakat. Pertama, bahwa perempuan Bali, yang selama ini relatif di bawah subordinasi laki-laki, perlu didorong untuk mengambil peran yang lebih luas dan aktif dalam mengatasi masalah-masalah publik, seperti penanggulangan kemiskinan. Kedua, bahwa perannya yang luas dalam komunitas lokal Bali menjadikan perempuan mampu sebagai role models sehingga diharapkan dapat berperan sebagai change agents yang mempercepat penyebaran nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kejujuran, kepedulian dan kerelawanan. Jadi berbeda dengan PNPM Mandiri Perkotaan yang meletakkan pembentukan lembaga dalam mendorong penanaman kembali civic virtue dalam komunitas, dalam model ini meletakkan perempuan sebagai sumbernya.

Model ini dilaksanakan melalui pendekatan kelompok usaha produktif yang menjadi sebuah “learning organization” sehingga diharapkan dapat menjadi tempat membangun kapasitas perempuan secara berkelanjutan dan intensif. Pendekatan dalam kelompok usaha produktif dipilih karena umumnya peran dalam ekonomi mendapat dukungan penuh dari laki-laki sehingga dapat meminimalkan resistensi para laki-laki ataupun komunitas lokal di Bali. Pembentukan kelompok ini dilengkapi dengan proses pembelajaran secara berkelanjutan yang disinergikan dengan sumber-sumber daya lainnya guna mengoptimalkan kemajuan kelompok.

Untuk pelaku, maka pelibatan desa adat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan menjadi penting. Alasannya, pertama karena ikatan desa adat sangat kuat dan nyata sehingga berpengaruh besar dalam komunitas lokal di Bali. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Bali yang tidak bisa lepas dari desa atau banjar adat meski tidak secara program tidak dirancang. Kedua, bahwa dalam adat, perempuan masih berada di sekitar pengambilan keputusan dan dominan berperan hanya dalam implementasi keputusan yang dibuat. Pelibatan desa adat diharapkan dapat membangun paradigma baru yang memungkinkan peran perempuan lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah publik.

D. KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini di Bali ternyata belum secara signifikan mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam penanggulangan masalah-masalah publik. Perempuan Bali masih menjadi salah satu

kelompok marginal dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Bali selama ini, juga masih kurang optimal menumbuhkembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kejujuran, keadilan dan kerelawanan yang menjadi tujuan program tersebut. Lembaga yang dibentuk program pemberdayaan, seperti BKM dalam PNPM Mandiri Perkotaan, gagal menjadi change agents dalam komunitas lokal Bali.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam penanggulangan kemiskinan, maka ditawarkan model pemberdayaan yang meletakkan perempuan sebagai sentral program yang diharapkan menjadi daya ungkit transformasi nilai dalam masyarakat. Model pemberdayaan ini dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha produktif karena peran perempuan Bali di bidang ekonomi mendapat dukungan penuh dari keluarga. Kelompok ini selain bertujuan untuk pembelajaran peningkatan pendapatan, juga merupakan wadah bagi proses penanaman dan penyebaran civic virtue dalam masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Model ini juga menempatkan keterlibatan desa adat dalam mendukung pelaksanaan model pemberdayaan bersinergi dengan semua pelaku lainnya seperti pemerintah (tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota).

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anonim. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perum Balai Pustaka.
Benjamin, W. (1998). Optimisme Makro, Pesimisme, Mikro Penafsiran

- Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Indonesia. PT. Gramedia Widia Sarana.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. (2007). PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
- Departemen Dalam Negeri. (2007). Penjelasan Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dewanta, S. (2000). *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*. Aditya Media.
- Dharmayuda, S. I. M. (1999). *Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang Dari Sudut Filsafat dan Agama*. Lembaga Pengkajian Budaya Bali.
- Dharmayuda, S. I. M. (2001). *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*.
- Dharmika, I. B. K., & Triguna, I. B. G. Y. (2002). *Dekonstruksi Ciri-Ciri Desa Pakraman*. STISPOL Wira Bhakti.
- Golafshani, N. (2003). *Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research*. *The Qualitative Report*, 8(4), 597-607. Retrieved from <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf>
- Havelock, R. G. (1973). *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. Educational Technology Publications, Inc.
- Kartasasmita, G. (1996). *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia*. PT. Pustaka LP3E.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan*. PT. Pustaka LP3E.
- Lunenburg, F. C. (2010). *Managing Change: The Role of The Change Agent*. *International Journal of Management, Business, and Administration*, 13(1). Retrieved from <http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Lunenburg,%20Fred%20C.%20Managing%20Change%20The%20Role%20of%20Change%20Agent%20IJMBA,%20V13%20N1%202010.pdf>
- Mubyarto. (1985). *Peluang Kerja Dan Peluang Berusaha Di Pedesaan*. BPFE.UGM.
- Muljono, P. (2010). *Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos daya (Pos Pemberdayaan Keluarga)*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23(1), 1-15.
- Mulyono, S. E. *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajah mungkur Kota Semarang*. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/viewFile/964/901>
- Ospina, S. (2004). *Qualitative Research*. In G. Goethals, G. Sorenson, & J. Mac Gregor (Eds.), *Encyclopedia of Leadership*. SAGE Publications.
- Ratnawati, S. (2011). *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan*

- Kewirausahaan. *Jurnal Kewirausahaan*, 5(2), 1-15.
- Rejkiningsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 28-44.
- Rindjin, I. K. (1999). Depolitisasi dan Politisasi Desa Adat Dalam Persepektif HAM. Disampaikan dalam rangka Martikulasi Program Pasca Sarjana Kajian Budaya Bali Universitas Udayana, Denpasar, 17 Juli 1999.
- Sirtha, I. N. (2002). Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung.
- Suda Sugira, I. K. (2002). Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali.
- Sumodiningrat, G. (1996). Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat. PT. Bina Rena Pariwara.
- Surpha, I. W. (1993). Eksistensi Desa Adat di Bali. PT Upada Sastra.
- Usman, S. (1998). *Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Pustaka Pelajar.
- Wahidin, A., Kasnawi, T., & Muhammad, R. Peranan Agen Perubahan dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemimpin Kolektif pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare). Retrieved from <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/8ac53716303f77694c6b0e67e73a442d.pdf>
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15-27.
- Zilfina, A. (2007). Analisis Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender. Pusat Penelitian Gender (PPG) Universitas Jambi. Contoh:
- Bryant P. 1999. Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999 from <http://darwinbio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.html>